

Pengaruh belanja modal urusan wajib dan urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin dengan jumlah pengangguran sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi

Selamet Rahmadi*; Dwi Hastuti; Parmadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*E-mail korespodensi: selametselamet023@gmail.com

Abstract

The research aims to measure and analyze the increase in mandatory affairs capital expenditures, optional capital expenditures, the number and number of poor people in Jambi Province, and to measure and analyze the direct and direct effect of mandatory and optional capital expenditures on the number of poor people through the total movement of spending. As an intervention variable in Jambi Province. The data used are secondary in the form of a time series from 2008-2020. Direct effect: capital expenditure on mandatory affairs on the number of poor people has a positive and significant impact, capital expenditure on elective experiences on the number of poor people has a negative and significant effect, capital expenditure on mandatory affairs on the population has a negative and significant impact, capital expenditure on elective experiences on the number of movements has a positive effect and significant the number of poor people has a positive and significant impact. Indirect effect: capital expenditure on mandatory affairs on the number of poor people through the number of negative and significant effects (the number of components cannot be used as an intervention variable) and capital expenditure on elective affairs on the number of poor people through the number of trees has a positive and significant effect.

Keywords: capital expenditure, unemployment, number of poor population

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengukur dan menganalisis peningkatan belanja modal urusan wajib, belanja modal urusan pilihan, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi dan mengukur dan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung belanja modal urusan wajib dan belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah pengangguran sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi. Data yang digunakan data sekunder dalam bentuk runtut waktu (*time series*) dari tahun 2008-2020. Pengaruh langsung : belanja modal urusan wajib terhadap jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan, belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan, belanja modal urusan wajib terhadap jumlah pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan, belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan. Pengaruh tidak langsung : belanja modal urusan wajib terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan (jumlah pengangguran tidak dapat dijadikan sebagai variabel intervening) serta belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan.

Kata kunci: belanja modal, pengangguran, jumlah penduduk miskin

PENDAHULUAN

Pembangunan dilaksanakan suatu negara atau daerah bertujuan membawa perubahan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2019) dan ditandai adanya peningkatan kapasitas produksi yang dapat mendorong kenaikan pendapatan nasional dalam suatu jangka waktu. (Todaro, 2010). Meningkatnya kapasitas produksi dan aktivitas perekonomian akan menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan jumlah penduduk miskin. (Mankiw, 2018)

Pertumbuhan ekonomi menurut Neo Klasik ditentukan oleh akumulasi kapital sebagai investasi, baik swasta maupun pemerintah. (Arsyad, 2018). Bentuk investasi pemerintah terlihat dari belanja daerah yang dikeluarkan. Belanja daerah dialokasikan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk membiayai kegiatan atau program di daerah, khususnya belanja modal. (Mangkoesobroto, 2006).

Belanja modal sebagai bagian belanja langsung pada belanja daerah ditujukan untuk menambah kekayaan dan aset daerah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja modal yang dilakukan ditujukan untuk pembangunan fasilitas publik seperti : jalan, jembatan, irigasi, telekomunikasi, bangunan dan lain-lainnya, melalui belanja urusan wajib dan urusan pilihan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007). Peningkatan belanja modal diharapkan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat secara khusus dan umumnya perekonomian daerah.

Aktivitas ekonomi yang meningkat, tentu membutuhkan tenaga kerja sebagai pelaku aktivitas ekonomi dan memperbesar terciptanya lapangan kerja. Kebutuhan tenaga kerja dari aktivitas ekonomi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang besar sekaligus mengurangi jumlah pengangguran. (Irawan dan Suparmoko, 2017). Berkurangnya jumlah pengangguran akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, dikarenakan aktivitas ekonomi memberi kesempatan penduduk memiliki peluang bekerja yang besar dan memiliki pendapatan. Kondisi ini pada akhirnya akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. (Kuncoro, 2019).

Upaya meningkatkan belanja daerah dalam membiayai pembangunan terus diupayakan di Provinsi Jambi setiap tahunnya. Belanja daerah di Provinsi Jambi selama tahun 2015-2020, rata-rata meningkat sebesar 7,53 persen. Peningkatan terjadi akibat meningkatnya belanja pada urusan pilihan rata-rata sebesar 169,22 persen dan belanja urusan wajib mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,87 persen. Belanja daerah Provinsi Jambi terjadi peningkatan, salah satunya adalah peningkatan belanja modal, baik untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Total belanja modal menurut urusan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 2,87. Peningkatan total belanja modal menurut urusan tersebut terjadi akibat meningkatnya belanja modal pada urusan pilihan rata-rata sebesar 40,42 persen dan belanja modal urusan wajib rata-rata sebesar 2,25 persen.

Belanja modal menurut urusan meningkat, baik pada belanja modal urusan wajib dan urusan pilihan bertujuan meningkatkan perekonomian daerah di Provinsi Jambi. Peningkatan belanja modal bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas dan pelayanan publik. Meningkatnya perekonomian akan tercipta lapangan kerja dan membutuhkan tenaga kerja yang besar. Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dari aktivitas ekonomi, selanjutnya akan mampu menampung tenaga kerja serta mengurangi jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang berkurang akan mendorong penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi selama tahun 2015-2020, rata-rata menurun sebesar 3,38 persen dan jumlah penduduk miskin rata-rata turun sebesar 2,62 persen.

Total belanja modal menurut urusan, yaitu belanja modal pada urusan wajib dan urusan pilihan di Provinsi Jambi terus meningkat. Peningkatan ini diikuti dengan

penurunan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Kondisi ini memperlihatkan, bahwa peningkatan belanja modal urusan wajib dan urusan pilihan memiliki hubungan berlawanan atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Penurunan jumlah pengangguran diharapkan akan mempercepat terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Kondisi ini sangatlah menarik itu diteliti dan diketahui lebih lanjut, bagaimana sesungguhnya pengaruh peningkatan belanja modal menurut urusan wajib dan urusan pilihan terhadap jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.

Pembangunan dilaksanakan suatu negara atau daerah bertujuan membawa perubahan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2019) dan ditandai adanya peningkatan kapasitas produksi yang dapat mendorong kenaikan pendapatan nasional dalam suatu jangka waktu. (Todaro, 2010). Meningkatnya kapasitas produksi dan aktivitas perekonomian akan menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan jumlah penduduk miskin. (Mankiw, 2018)

Pertumbuhan ekonomi menurut Neo Klasik ditentukan oleh akumulasi kapital sebagai investasi, baik swasta maupun pemerintah. (Arsyad, 2018). Bentuk investasi pemerintah terlihat dari belanja daerah yang dikeluarkan. Belanja daerah dialokasikan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk membiayai kegiatan atau program di daerah, khususnya belanja modal. (Mangkoesobroto, 2006).

Belanja modal sebagai bagian belanja langsung pada belanja daerah ditujukan untuk menambah kekayaan dan aset daerah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja modal yang dilakukan ditujukan untuk pembangunan fasilitas publik seperti : jalan, jembatan, irigasi, telekomunikasi, bangunan dan lain-lainnya, melalui belanja urusan wajib dan urusan pilihan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007). Peningkatan belanja modal diharapkan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat secara khusus dan umumnya perekonomian daerah.

Aktivitas ekonomi yang meningkat, tentu membutuhkan tenaga kerja sebagai pelaku aktivitas ekonomi dan memperbesar terciptanya lapangan kerja. Kebutuhan tenaga kerja dari aktivitas ekonomi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang besar sekaligus mengurangi jumlah pengangguran. (Irawan dan Suparmoko, 2017). Berkurangnya jumlah pengangguran akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, dikarenakan aktivitas ekonomi memberi kesempatan penduduk memiliki peluang bekerja yang besar dan memiliki pendapatan. Kondisi ini pada akhirnya akan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. (Kuncoro, 2019).

Upaya meningkatkan belanja daerah dalam membiayai pembangunan terus diupayakan di Provinsi Jambi setiap tahunnya. Belanja daerah di Provinsi Jambi selama tahun 2015-2020, rata-rata meningkat sebesar 7,53 persen. Peningkatan terjadi akibat meningkatnya belanja pada urusan pilihan rata-rata sebesar 169,22 persen dan belanja urusan wajib mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,87 persen.

Belanja daerah Provinsi Jambi terjadi peningkatan, salah satunya adalah peningkatan belanja modal, baik untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Total belanja modal menurut urusan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 2,87. Peningkatan total belanja modal menurut urusan tersebut terjadi akibat meningkatnya belanja modal pada urusan pilihan rata-rata sebesar 40,42 persen dan belanja modal urusan wajib rata-rata sebesar 2,25 persen.

Belanja modal menurut urusan meningkat, baik pada belanja modal urusan wajib dan urusan pilihan bertujuan meningkatkan perekonomian daerah di Provinsi Jambi. Peningkatan belanja modal bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas dan pelayanan publik. Meningkatnya perekonomian akan tercipta lapangan kerja dan

membutuhkan tenaga kerja yang besar. Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dari aktivitas ekonomi, selanjutnya akan mampu menampung tenaga kerja serta mengurangi jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang berkurang akan mendorong penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi selama tahun 2015-2020, rata-rata menurun sebesar 3,38 persen dan jumlah penduduk miskin rata-rata turun sebesar 2,62 persen.

Total belanja modal menurut urusan, yaitu belanja modal pada urusan wajib dan urusan pilihan di Provinsi Jambi terus meningkat. Peningkatan ini diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Kondisi ini memperlihatkan, bahwa peningkatan belanja modal urusan wajib dan urusan pilihan memiliki hubungan berlawanan atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Penurunan jumlah pengangguran diharapkan akan mempercepat terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Kondisi ini sangatlah menarik itu diteliti dan diketahui lebih lanjut, bagaimana sesungguhnya pengaruh peningkatan belanja modal menurut urusan wajib dan urusan pilihan terhadap jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.

METODE

Sumber data

Penelitian dilakukan di Provinsi Jambi dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk runtun waktu (*time series*) yaitu selama tahun 2008-2020, yaitu data yang telah dipublikasikan oleh suatu kantor atau lembaga yang berbentuk data rentang waktu (*time series*). (Arikunto, 2010). Data sekunder yang digunakan meliputi : realisasi total belanja modal menurut urusan dalam satuan rupiah di Provinsi Jambi, realisasi belanja modal urusan wajib dalam satuan rupiah di Provinsi Jambi, realisasi belanja modal urusan pilihan dalam satuan rupiah di Provinsi Jambi, jumlah pengangguran dalam satuan jiwa/orang di Provinsi Jambi dan jumlah penduduk miskin dalam satuan jiwa/orang di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi.

Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan metode kuantitatif. Alat analisis untuk menjawab tujuan pertama menggunakan metode analisis dekriptif kuantitatif yaitu rumus perkembangan. (Agustina dkk, 2018).

$$R_x = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Metode untuk menjawab tujuan kedua menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu metode analisis jalur (*Path Analysis*). Metode analisis jalur digunakan untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel yang diukur. (Sunnyoto, 2012). Model persamaan yang digunakan adalah :

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu \dots\dots\dots \text{(Struktural 1)}$$

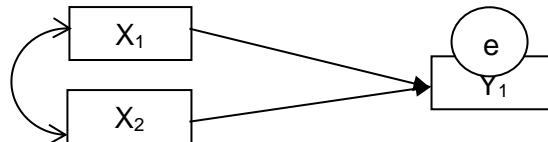
$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Y_1 + \mu \dots\dots\dots \text{(Struktural 2)}$$

Keterangan :

- Y₁ : Jumlah pengangguran
- Y₂ : Jumlah penduduk miskin
- X₁ : Belanja modal urusan wajib

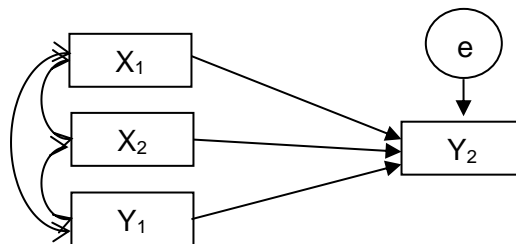
- X_2 : Belanja modal urusan pilihan
- X_{2i} : Variabel belanja modal menurut urusan wajib dan urusan pilihan
- α : Konstanta
- $\beta_{1,2,3}$: Koefisien parameter regresi
- μ : Standar Error

Model persamaan struktural 1 diatas menjelaskan bagaimana pengaruh belanja modal urusan wajib dan belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi. Bentuk diagram struktural 1 sebagai berikut :



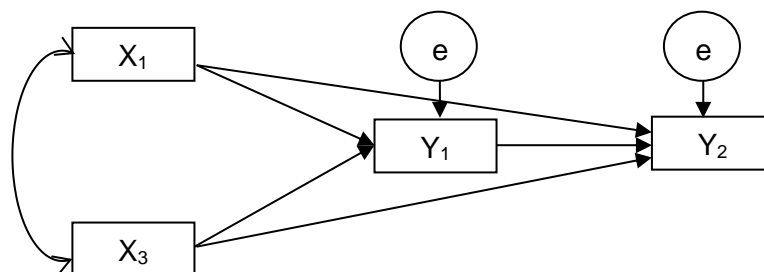
Gambar 1. Persamaan Struktur 1

Model persamaan struktural 2 diatas menjelaskan bagaimana pengaruh belanja modal urusan wajib, belanja modal urusan pilihan dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Bentuk diagram struktural 2 sebagai berikut :



Gambar 2. Persamaan Struktur 2

Pengaruh belanja modal urusan wajib dan belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin dengan jumlah pengangguran sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi menggunakan model analisis jalur dengan bentuk diagram jalur sebagai berikut :



Gambar 3. Model diagram jalur

Uji asumsi klasik

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan diantara variabel independen dalam model. (Widarjono, 2018). Uji

Multikolinieritas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai VIF > 10, maka terdapat multikolinieritas dan jika VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen.

Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu pada suatu periode berkorelasi atau tidak terhadap variabel pengganggu lainnya. Uji autokorelasi menggunakan metode Breusch-Godfrey atau LM (*Lagrange Multiplier*) test. Kriterianya adalah : jika nilai Prob. Obs*R-squared > alpha 0,05 (5%), maka ada autokorelasi dan jika nilai Prob. Obs*R-squared < alpha 0,05, maka tidak ada autokorelasi. (Wahyu,2009).

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau melihat penyebaran data. Uji heteroskedastisitas, menggunakan metode *Glejser Heterocedasticity Test*. Kriterianya adalah : jika nilai obs*R-squared > X² tabel, maka tidak ada heteroskedastisitas dan jika nilai obs*R-squared < X² tabel, maka ada heteroskedastisitas.

Uji hipotesis

Uji F statistik (uji secara bersama-sama)

Uji F statistik bertujuan untuk mengetahui (signifikan) variabel independen dalam model secara bersama-sama (*over all*) terhadap variabel dependen. Uji F statistik menggunakan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : Jika F statistik > F tabel, maka Ho ditolak. Artinya secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika F statistik < F tabel, maka Ho diterima. Artinya secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t statistik (uji secara parsial)

Uji t statistik bertujuan untuk mengetahui (signifikan) masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t statistik menggunakan kriteria pengambilan keputusan : Jika t statistik > t tabel, maka Ho ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t statistik < t tabel, maka Ho diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.\

Koefisien determinasi (R-square)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui ketepatan atau kecocokkan garis regresi yang terbentuk dalam model regresi dari data yang dianalisis dan menggambarkan variasi total yang dapat diterangkan oleh model. Semakin besar nilai R² (mendekati 1), maka model semakin baik dan sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan ketersediaan anggaran untuk dibelanjakan. Anggaran belanja daerah yang besar, maka akan semakin besar kegiatan atau program yang mampu dibiayai atau dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi, salah

satunya belanja modal. Belanja modal ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur dalam rangka pelayanan publik dan sekaligus menambah aset daerah. Belanja modal tersebut dilakukan oleh badan, kantor, lembaga atau dinas sebagai pelaksana sesuai urusan/fungsinya. Belanja modal Provinsi Jambi dilakukan dalam bentuk belanja modal untuk urusan wajib dan belanja modal urusan pilihan.

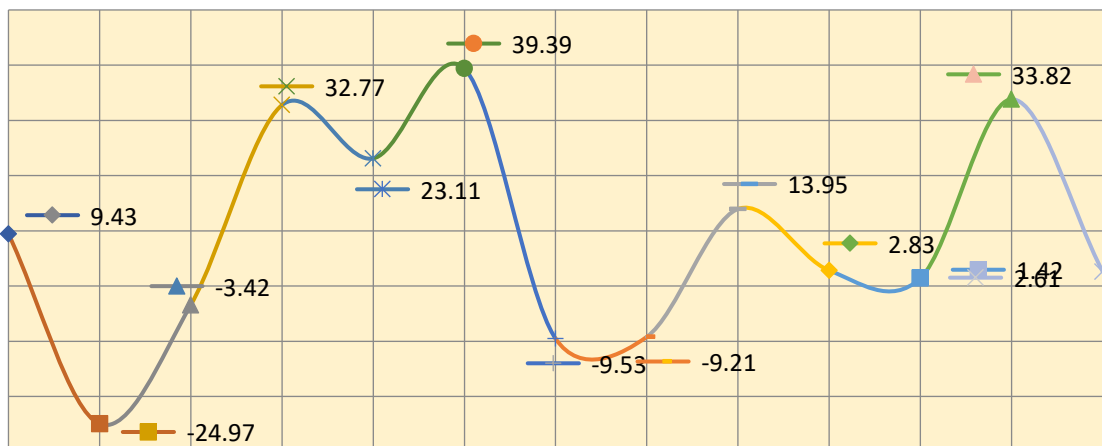
Peningkatan belanja modal urusan wajib, belanja modal urusan pilihan, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan ketersediaan anggaran untuk dibelanjakan. Anggaran belanja daerah yang besar, maka akan semakin besar kegiatan atau program yang mampu dibiayai atau dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi, salah satunya belanja modal. Belanja modal ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur dalam rangka pelayanan publik dan sekaligus menambah aset daerah. Belanja modal tersebut dilakukan oleh badan, kantor, lembaga atau dinas sebagai pelaksana sesuai urusan/fungsinya. Belanja modal Provinsi Jambi dilakukan dalam bentuk belanja modal untuk urusan wajib dan belanja modal urusan pilihan.

Perkembangan belanja modal urusan wajib Provinsi Jambi

Belanja modal urusan wajib adalah belanja modal yang ditujukan untuk memberikan pelayan publik atau masyarakat yang bersifat sangat mendasar dan diselenggarakan oleh pemerintah. Belanja modal urusan wajib di Provinsi Jambi selama tahun 2008-2020 mengalami fluktuasi. Rata-rata belanja modal mengalami peningkatan 7,90 persen setiap tahun. Belanja modal urusan wajib meningkat dari Rp. 590.055.770.836,00 pada tahun 2008 menjadi Rp. 1.305.609.872.521,00 di tahun 2020.

Kantor, lembaga, badan dan dinas sebagai pelaksana belanja modal urusan wajib di Provinsi Jambi saat ini berjumlah dua puluh empat, yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum, Perumahan rakyat, Penataan ruang, Perencanaan pembangunan, Sosial, Koperasi dan usaha kecil dan menengah, Pemuda dan olah raga, Pemerintahan umum, Pemberdayaan masyarakat dan desa, Komunikasi dan informatika, Perhubungan, Lingkungan hidup, Kependudukan dan catatan sipil, Pemberdayaan perempuan, Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, Tenaga kerja, Penanaman modal, Kebudayaan, Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
Kepegawaain, Statistik dan arsip.



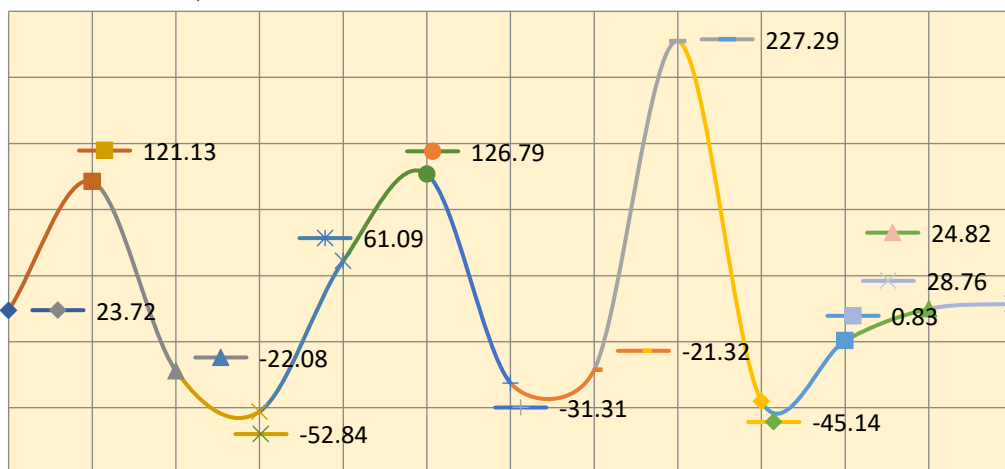
Gambar 4. Perkembangan belanja modal wajib Provinsi Jambi Tahun 2008-2020

Belanja modal urusan pilihan terjadi peningkatan terbesar pada tahun 2013 yaitu naik 39,39 persen dengan nilai belanja modal sebesar Rp. 974.142.569.500,00. Belanja modal menurut urusan wajib terjadi penurunan terbesar ada pada tahun 2009, yaitu turun 24,97 persen dengan nilai belanja modal besar Rp. 442.697.576.663,00. Berfluktuasinya belanja modal urusan wajib disebabkan kegiatan atau program setiap kantor, lembaga, badan dan dinas dilaksanakan berbeda-beda setiap tahun sesuai yang dibutuhkan masyarakat, adanya kantor, lembaga, badan dan dinas yang dihapus atau digabung dan di mekarkan kembali pada tahun tertentu.

Perkembangan belanja modal urusan wajib Provinsi Jambi yang terjadi penurunan, selain tahun 2009 juga terjadi di tahun 2010 : 3,42 persen, tahun 2014 : 9,53 persen dan tahun 2015 : 9,21 persen. Belanja modal urusan wajib yang terjadi peningkatan terjadi pada tahun 2008 : 9,43 persen, tahun 2011 : 32,77 persen, tahun 2012 : 23,11 persen, tahun 2016 : 13,65 persen, tahun 2017 : 2,83 persen, tahun 2018 : 1,42 persen, tahun 2019 : 33,82 persen dan tahun 2020 sebesar 2,61 persen

Perkembangan belanja modal urusan pilihan Provinsi Jambi

Belanja modal urusan pilihan adalah belanja modal yang ditujukan urusan pemerintah dan secara nyata berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah. Belanja modal urusan pilihan di Provinsi Jambi selama tahun 2008-2020 mengalami fluktuasi. Rata-rata belanja modal urusan pilihan mengalami peningkatan 32,16 persen setiap tahun. Belanja modal urusan wajib meningkat dari Rp. 18.645.078.704,00 pada tahun 2008 menjadi Rp. 87.036.579.216,00 di tahun 2020.



Gambar 5. Perkembangan Belanja Modal Pilihan Provinsi Jambi Tahun 2008-2020

Perkembangan belanja modal urusan pilihan Provinsi Jambi yang terjadi penurunan, selain tahun 2017 adalah di tahun 2010 : 22,08 persen, tahun 2014 : 31,31 persen, tahun 2015 : 21,32 persen dan tahun 2017 : 45,14 persen. Belanja modal urusan wajib yang terjadi peningkatan terjadi pada tahun : 2008, 2009, 2012, 2013, 2018, 2019 dan 2020.

Kantor, lembaga, badan dan dinas sebagai pelaksana belanja modal urusan pilihan di Provinsi Jambi saat ini berjumlah dua puluh empat, yaitu: Pertanian, Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Pariwisata, Kelautan dan perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Belanja modal urusan pilihan terjadi peningkatan terbesar pada tahun 2016 yaitu naik 227,29 persen dengan nilai belanja modal sebesar Rp. 97.903.005.600,00. Belanja modal menurut urusan pilihan terjadi penurunan terbesar ada pada tahun 2011, yaitu turun 52,84 persen dengan nilai belanja modal besar Rp.

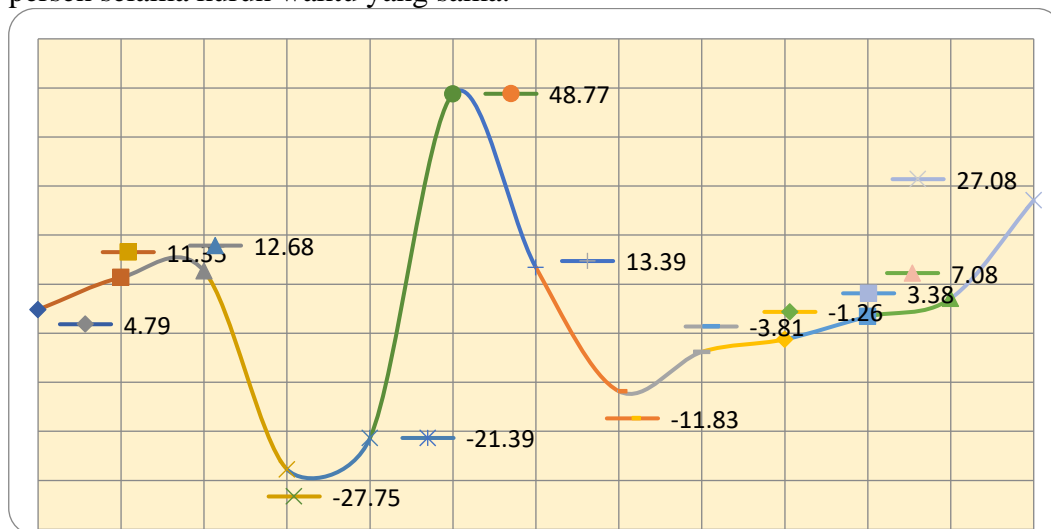
15.149.326.000,00. Berfluktuasinya belanja modal urusan wajib disebabkan kegiatan atau program setiap kantor, lembaga, badan dan dinas dilaksanakan berbeda-beda setiap tahun sesuai perkembangan potensi yang dimiliki Provinsi Jambi, adanya kantor, lembaga, badan dan dinas yang dihapus atau digabung dan di mekarkan kembali pada tahun tertentu serta adanya bagian atau bidang tertentu yang dibentuk dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan jumlah pengangguran Provinsi Jambi

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran yang terjadi di suatu daerah pada dasarnya akan memberi dampak negatif pada daerah dan masyarakat dalam segala aspek, baik termasuk Provinsi Jambi. Jumlah pengangguran dalam penelitian ini adalah pengangguran terbuka.

Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi tahun 2008-2020 mengalami fluktuasi. Fluktuasi yang terjadi sebagai akibat kondisi yang terjadi pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi, karena adanya perbedaan dalam hal : terbatasnya lapangan kerja yang tercipta/tersedia, potensi sumber daya alam, anggaran yang terbatas, kualitas sumberdaya manusia dan kondisi ekonomi nasional. Jumlah pengangguran Provinsi Jambi tahun 2008-2020, rata-rata meningkat 4,44 persen, dimana jumlah pengangguran dari 66.371 jiwa pada tahun 2008 naik menjadi 93.993 jiwa pada tahun 2020. Jumlah pengangguran tertinggi terjadi ditahun 2013, yaitu 48,77 persen dengan jumlah pengangguran 70.361 jiwa dan terjadi penurunan terbesar pada tahun 2011, yaitu 27,75 persen dengan jumlah pengangguran 60.169 jiwa.

Peningkatan dan penurunan pengangguran yang terjadi selain yang disebutkan diatas juga disebabkan semakin meningkatnya jumlah tamatan SD, SMP, SMU yang tidak dapat melanjutkan pendidikan serta meningkatnya tamatan dari perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi, khusus di akhir tahun 2019-2020, disebabkan pengaruh virus COVID-19 yang melanda Indonesia dan ini membawa dampak, terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan serta adanya pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan pemerintah. Rata-rata jumlah pengangguran Provinsi Jambi lebih rendah dibanding peningkatan jumlah pengangguran secara nasional, yaitu 6,41 persen selama kurun waktu yang sama.



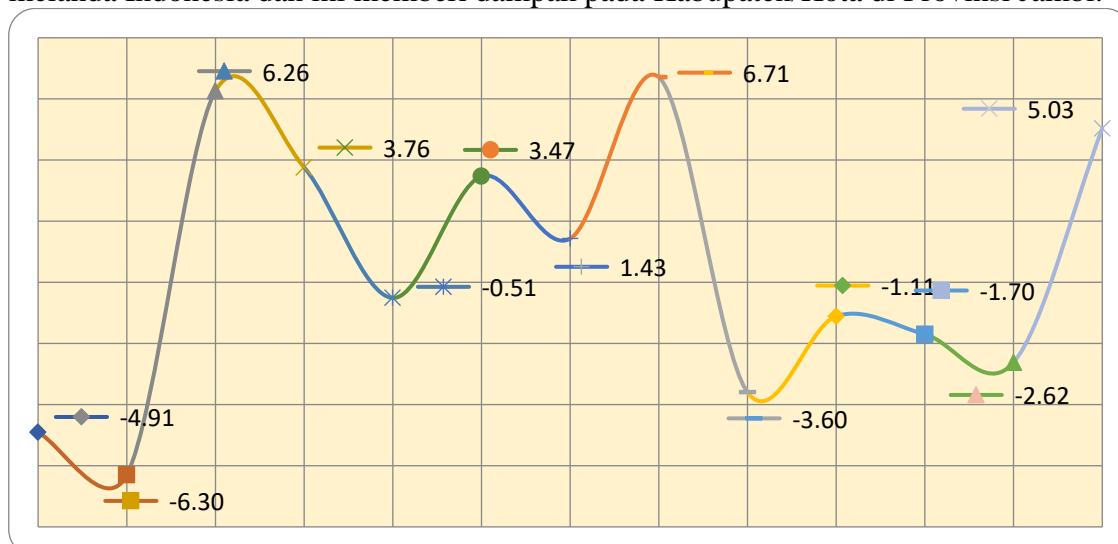
Gambar 6. Perkembangan jumlah pengangguran Provinsi Jambi Tahun 2008-2020

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jambi

Kemiskinan sebagai masalah sosial yang utama telah lama ada dan berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Sebagai masalah sosial, maka kemiskinan harus mampu dikurangi bahkan dihilangkan. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat disebabkan lemahnya kemampuan berusaha dan terbatas akses terhadap kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi tinggi.

Jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi selama tahun 2008-2020 mengalami peningkatan. Rata-rata jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan 0,83 persen, yaitu dari jumlah penduduk miskin 261.145 jiwa pada tahun 2008 menjadi 288.103 jiwa di tahun 2020. Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2015, yaitu 6,71 persen dengan jumlah penduduk miskin 300.601 jiwa dan mengalami penurunan paling besar terjadi pada tahun 2008, yaitu 4,91 persen dengan jumlah penduduk miskin 261.145 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi lebih rendah dibanding peningkatan jumlah penduduk miskin secara nasional, yaitu 11,68 persen selama kurun waktu yang sama.

Peningkatan atau penurunan jumlah penduduk miskin terjadi sebagai akibat keterbatasan lapangan kerja yang tercipta pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, kondisi ini mendorong terjadinya peningkatan pengangguran dan menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat. Peningkatan jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi, selain tahun 2015, juga terjadi pada tahun 2010, yaitu meningkat 6,26 persen dengan jumlah penduduk miskin 260.019 jiwa, pada tahun 2011, meningkat 3,76 persen dengan jumlah penduduk miskin 269.796 jiwa, di tahun 2013, jumlah penduduk miskin meningkat 3,47 persen dengan jumlah penduduk miskin 277.731 jiwa, pada tahun 2014 terjadi peningkatan 1,43 persen dengan jumlah penduduk miskin 281.705 jiwa dan di tahun 2020 meningkat kembali sebesar 5,03 persen dengan jumlah penduduk miskin 288.103 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin meningkat akibat turunnya aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sebagai dampak virus COVID-19 yang melanda Indonesia dan ini memberi dampak pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.



Gambar 7. Perkembangan jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi Tahun 2008-2020

Hasil uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang baik atau tidak serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku pada analisis regresi berganda. Untuk mengetahui melanggar tidaknya dari

ketentuan tersebut, maka dilakukan uji asumsi klasik antar variabel bebas (independen) yang digunakan pada persamaan persamaan struktur 1, persamaan struktur 2 dan pada analisis jalur, yaitu : belanja modal urusan wajib, belanja modal urusan pilihan, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik diperoleh sebagai berikut :

Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam model. Ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas dan jika nilai VIF > 10, maka terjadi multikolinieritas. (Widarjiono,2018). Hasil uji multikolinieritas menunjukkan, bahwa variabel belanja modal urusan wajib, belanja modal urusan pilihan dan jumlah pengangguran Provinsi Jambi semuanya memiliki nilai VIF < 10, artinya model regresi tidak ada multikolinieritas.

Tabel 1. Hasil perhitungan uji multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.294217	11129.69	NA
Belmodalwajib01	0.002288	12245.81	1.942178
Belmodalpilihan01	0.001152	4913.326	2.427178
Jpengangguran01	0.007531	6689.966	1.357027

Sumber: Data diolah, 2021

Uji autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesalahan pengganggu dari periode tertentu (μ_t) berkorelasi dengan kesalahan pengganggu dari periode sebelumnya (μ_{t-1}). Ada tidaknya autokorelasi, alat uji yang digunakan dalam model ini adalah Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Jika nilai probabilitas dari $Obs*R\text{-square} < 0,05$, maka ada autokorelasi dan nilai probabilitas $Obs*R\text{-square} > 0,05$, maka tidak ada autokorelasi. (Widarjiono,2018). Hasil uji autokorelasi menunjukkan, bahwa variabel belanja modal urusan wajib, belanja modal urusan pilihan dan jumlah pengangguran Provinsi Jambi nilai probabilitas $Obs*R\text{-square} > 0,05$, yaitu 0,1840, artinya model regresi tidak ada autokorelasi.

Tabel 2. Hasil perhitungan uji autokorelasi Breusch-Godfrey serial correlation LM test:

F-statistic	1.232423	Prob. F(2,7)	0.3479
Obs*R-squared	3.385474	Prob. Chi-Square(2)	0.1840

Sumber: Data diolah, 2021

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada tidaknya heteroskedastisitas, maka alat uji yang digunakan dalam model adalah uji glejser dengan melihat nilai signifikannya.

Jika nilai Glejser > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai Glejser < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.(Widarjono, 2015). Hasil uji autokorelasi menunjukkan, bahwa variabel belanja modal urusan wajib, belanja modal urusan pilihan dan jumlah pengangguran Provinsi Jambi nilai probabilitas Chi-Squarenya, yaitu 0,8929 > 0,05, artinya model regresi tidak ada heteroskedstisitas.

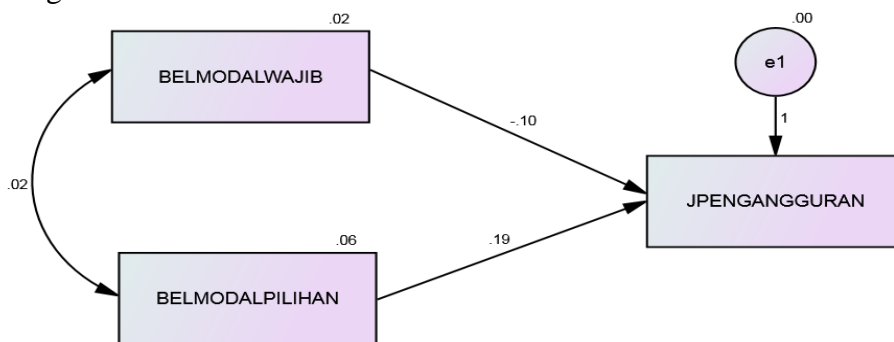
Tabel 3. Hasil perhitungan uji hetriskedastisitas
Heteroskedasticity test: Glejser

F-statistic	0.149091	Prob. F(3,9)	0.9277
Obs*R-squared	0.615474	Prob. Chi-Square(3)	0.8929
Scaled explained SS	0.488534	Prob. Chi-Square(3)	0.9214

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil estimasi persamaan struktural pertama

Hasil perhitungan persamaan struktural pertama, yaitu pengaruh belanja modal urusan wajib dan belanja modal urusan pilhan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi dijelaskan pada diagram jalur gambar 5.5. dan hasil regression weights tabel 5.8 sebagai berikut :



Gambar 8. Diagram jalur struktural pertama

Tabel 4. Regression weights: (group number 1-default model) struktur 1

			Estimate	P
Jpengangguran	<---	Belmodalwajib	.098	.030
Jpengangguran	<---	Belmodalpilihan	.186	.042

Sumber: Data diolah, 2021

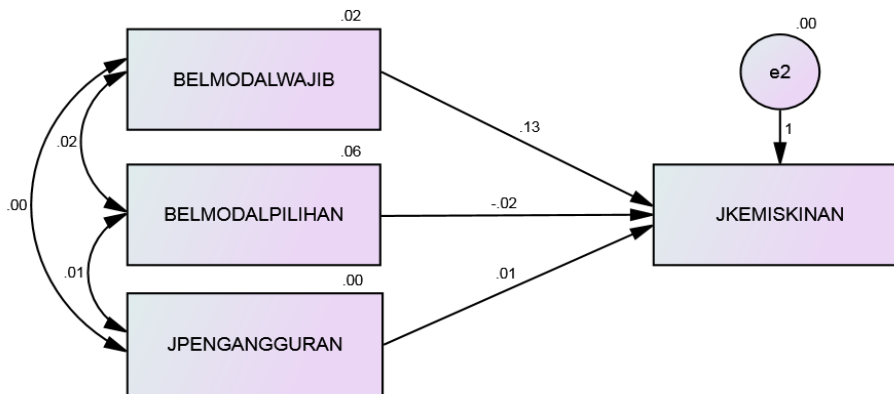
Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4 variabel belanja modal urusan wajib memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi, dimana nilai p-value = 0,030 < α = 0,05 yang digunakan. Nilai koefisien belanja modal urusan wajib sebesar – 0,098, artinya apabila belanja modal urusan wajib naik 1 persen maka akan menurunkan jumlah pengangguran sebesar 0,098 persen.

Hasil estimasi pada belanja modal urusan pilihan menunjukkan, variabel belanja modal urusan pilihan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi dengan nilai koefisien sebesar 0,186 dan nilai p-value = 0,042 < α = 0,05. Artinya, apabila belanja modal urusan pilihan naik 1 persen maka jumlah pengangguran meningkat sebesar 0,186 persen. Secara bersama-sama variabel belanja modal urusan wajib dan belanja modal urusan pilihan mampu menjelaskan

perubahan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi sebesar 0,863 (nilai R-Square) atau sebesar 86,3 persen.

Hasil estimasi persamaan struktural kedua

Hasil perhitungan persamaan struktural kedua, yaitu pengaruh belanja modal urusan wajib, belanja modal urusan pilhan dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi dijelaskan pada diagram jalur gambar 5.6. dan hasil regression weights tabel 5.9 sebagai berikut :



Gambar 9. Diagram jalur struktural kedua

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 5.9, variabel belanja modal urusan wajib memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi, dimana nilai p-value = 0,003 < α = 0,05. Nilai koefisien belanja modal urusan wajib sebesar 0,125, artinya apabila belanja modal urusan wajib naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,125 persen. Hasil estimasi menunjukkan, variabel belanja modal urusan pilihan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi dengan nilai koefisien sebesar -0,019 dan nilai p-value = 0,029 < α = 0,05. Artinya, apabila belanja modal urusan pilihan naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0,019 persen.

Tabel 5. Regression weights: (group number 1-default model) struktur 2

			Estimate	P
Jkemiskinan	<---	Belmodalwajib	.125	.003
Jkemiskinan	<---	Belmodalpilihan	-.019	.029
Jkemiskinan	<---	Jpengangguran	.012	.038

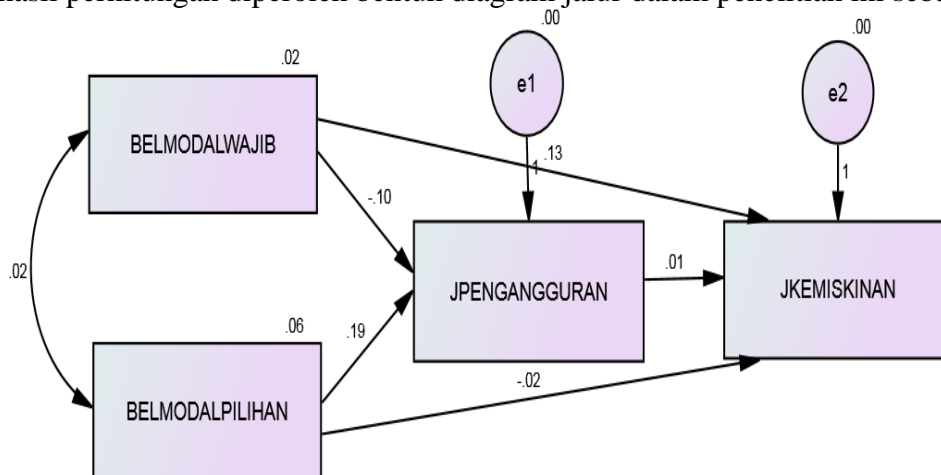
Sumber: Data diolah, 2021

Sementara estimasi pada variabel jumlah pengangguran menunjukkan, variabel jumlah pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi dengan nilai koefisien sebesar 0,012 dan nilai p-value = 0,038 < α = 0,05. Artinya, apabila jumlah pengangguran naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,012 persen. Secara bersama-sama variabel belanja modal urusan wajib, belanja modal urusan pilihan dan jumlah pengangguran mampu menjelaskan perubahan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 0,524 (nilai R-Square) atau sebesar 52,4 persen.

Hasil analisis jalur

Estimasi persamaan regresi jalur

Berdasarkan hasil estimasi pada persamaan struktural pertama dan persamaan struktural kedua, maka dapat diperoleh bentuk diagram jalur (path diagram). Adapun hasil perhitungan diperoleh bentuk diagram jalur dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 10. Diagram analisis jalur

Berdasarkan output hasil perhitungan model analisis jalur tabel 5.10, maka dapat dibentuk persamaannya sebagai berikut :

$$Jpengangguran = -0,098belmodalwajib + 0,186belmodalpilihan$$

$$Jkemiskinan = 0,125belmodalwajib - 0,019belmodalpilihan + 0,012jpengangguran$$

Belanja modal urusan wajib dan belanja modal urusan pilihan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi, dimana nilai p-value masing-masing variabel $0,030$ dan $0,042 < \alpha = 0,05$ yang digunakan. Belanja modal urusan wajib, belanja modal urusan pilihan dan jumlah pengangguran berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi, dimana nilai p-value masing-masing variabel $0,003$, $0,029$ dan $0,38 < \alpha = 0,05$.

Tabel 6. Rekapitulasi regression weights: (group number 1- default model) analisis jalur

			Estimate	P
Jpengangguran	<---	Belmodalwajib	-.098	.030
Jpengangguran	<---	Belmodalpilihan	.186	.042
Jkemiskinan	<---	Jpengangguran	.012	.038
Jkemiskinan	<---	Belmodalpilihan	-.019	.029
Jkemiskinan	<---	Belmodalwajib	.125	.003

Sumber: Data diolah, 2021

Uji model fit

Hasil perhitungan diatas didukung ketepatan model yang digunakan. Menurut Hair dkk (2009), kriteria model yang tepat/baik/cocok, jika : $CMIN/DF > 0,05$, $GFI > 0,9$, $CFI > 0,9$ dan $RMSEA < 0,08$. Model yang digunakan dalam penelitian ini sudah

tepat/baik/cocok, dimana ditunjukkan oleh hasil dari : $CMIN/DF = 0,317 > 0,05$, $GFI = 1,000 > 0,9$, $CFI = 1,000 > 0,9$ dan $RMSEA = 0,053 < 0,08$.

Tabel 7. Rekapitulasi model fit summary

Jenis model fit	Nilai uji model	Keterangan
CMIN/DF	0,317 > 0,05	Tepat/baik/cocok
GFI	1,000 > 0,90	Tepat/baik/cocok
CFI	1,000 > 0,90	Tepat/baik/cocok
RMSEA	0,053 < 0,08	Tepat/baik/cocok

Sumber: Data diolah, 2021

Pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan total pengaruh

Kecocokan model yang digunakan dalam analisis jalur, selanjutnya digunakan untuk menentukan pengaruh langsung dari variabel independen yang diukur terhadap variabel dependen. Pengaruh langsung belanja modal urusan pilihan dan belanja modal urusan wajib dalam menentukan perubahan jumlah pengangguran di Provinsi Jambi adalah, belanja modal urusan pilihan di Provinsi Jambi secara langsung dapat menentukan perubahan jumlah pengangguran dengan koefisien sebesar 0,635 atau $0,635^2 \times 100 \% = 40,32 \%$. Belanja modal urusan wajib secara langsung dapat menentukan perubahan jumlah pengangguran dengan koefisien sebesar 0,213 atau $0,213^2 \times 100 \% = 4,54 \%$.

Tabel 8. Standardized direct effects (group number 1 - Default model)

	Belmodalpilihan	Belmodalwajib	Jpengangguran
Jpengangguran	.635	-.213	.000
Jkemiskinan	-.198	.839	.039

Sumber: Data diolah, 2021

Pengaruh langsung belanja modal urusan pilihan, belanja modal urusan wajib dan jumlah pengangguran dalam menentukan perubahan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi adalah, belanja modal urusan pilihan secara langsung dapat menentukan perubahan jumlah penduduk miskin dengan koefisien sebesar -0,198 atau $0,198^2 \times 100 \% = 3,92 \%$. Belanja modal urusan wajib secara langsung dapat menentukan perubahan jumlah penduduk miskin dengan koefisien sebesar 0,839 atau $0,839^2 \times 100 \% = 70,39 \%$. Jumlah pengangguran secara langsung dapat menentukan perubahan jumlah penduduk miskin dengan koefisien sebesar 0,039 atau $0,039^2 \times 100 \% = 0,15 \%$.

Tabel 9. Hasil uji Sobel

Pengaruh tidak langsung	Estimate	P-Value	Z-Sobel
Belmodal Wajib --> Jpengangguran - -> Jkemiskinan	-0,001176	0,27288658	-0,60410601
Belmodal Pilihan --> Jpengangguran -> Jkemiskinan	0,002232	0,03951710	2,47939717

Sumber: Data diolah, 2021

Pengaruh tidak langsung (*Indirect Effects*) belanja modal urusan wajib terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah pengangguran di Provinsi Jambi dari nilai perhitungan Sobel tes menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,001176, P-value sebesar 0,27288658 dan nilai Z Sobel sebesar $-0,60410601 < 1,96$. Artinya belanja modal urusan wajib berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah pengangguran di Provinsi Jambi. Pengaruh tidak langsung belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,002232, P-value sebesar 0,03951710 dan nilai Z Sobel sebesar $2,47939717 > 1,96$. Artinya belanja modal urusan pilihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah pengangguran di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil perhitungan pengaruh langsung (*Direct Effects*) dan tidak langsung (*Indirect Effects*), maka dapat ditentukan nilai pengaruh totalnya (*Total Effects*). Nilai pengaruh total adalah penjumlahan koefisien estimasi pengaruh langsung ditambah dengan koefisien estimasi pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan diperoleh : pengaruh total belanja modal urusan wajib terhadap jumlah penduduk miskin sebesar $-0,099176$ ($-0,098 + (-0,001176)$) dan pengaruh total belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin sebesar $0,188232$ ($0,186 + 0,002232$).

Uji hipotesis

Pengaruh belanja modal urusan pilihan, belanja modal urusan wajib dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi diperoleh nilai koefisien determinasi (R-square) sebesar 0,524. Artinya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi dapat dijelaskan oleh variabel belanja modal urusan pilihan, belanja modal urusan wajib dan jumlah penganggura sebesar 52,4 persen sedangkan sisanya 47,6 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini.

Tabel 10. Squared multiple correlations: (group number 1 - default model)

	Estimate
Jpengangguran	.863
Jkemiskinan	.524

Sumber: Data diolah, 2021

Pengaruh belanja modal urusan pilihan dan belanja modal urusan wajib terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi diperoleh nilai koefisien determinasi (R-square) sebesar 0,863. Artinya jumlah pengangguran di Provinsi Jambi dapat dijelaskan oleh variabel belana modal urusan wajib dan belanja modal urusan pilihan sebesar 86,3 persen sedangkan sisanya 13,7 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini.

Tabel 11. Rekapitulasi hasil perhitungan regresi

R-squared	0.523601	Mean dependent var	5.440769
Adjusted R-squared	0.364801	S.D. dependent var	0.023260
S.E. of regression	0.018538	Akaike info criterion	-4.890324
Sum squared resid	0.003093	Schwarz criterion	-4.716493
Log likelihood	35.78711	Hannan-Quinn criter.	-4.926054
F-statistic	5.297239	Durbin-Watson stat	1.241462
Prob(F-statistic)	0.009725		

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil perhitungan koefisien determinasi (R-Square) dari pengaruh belanja modal urusan pilihan, belanja modal urusan wajib dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi didukung oleh uji F statistik. Hasil uji F statistik diperoleh nilai F statistik = $5,297239 > F \text{ tabel} = 3,86$ dan Prob (F-statistic) sebesar $0,009725 < 0,05$. Artinya belanja modal urusan pilihan, belanja modal urusan wajib dan jumlah pengangguran secara bersama-sama berpengaruh sangat signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.

Pengaruh belanja modal urusan wajib terhadap jumlah pengangguran

Belanja modal urusan wajib di Provinsi Jambi memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-0,098$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,030$. Artinya, belanja modal urusan wajib berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi. Jika belanja modal urusan wajib naik 1 persen, maka akan menurunkan jumlah pengangguran di Provinsi Jambi sebesar $0,098$ persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis, bahwa belanja modal urusan wajib berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi. Hal ini menggambarkan, bahwa belanja modal urusan wajib Provinsi Jambi digunakan oleh badan, kantor, lembaga dan dinas untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat atau pelayan publik, dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja yang dilakukan untuk membiayai kegiatan atau program mampu menciptakan lapangan kerja dan mampu memberdayakan masyarakat Provinsi Jambi.

Pengaruh belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah pengangguran

Belanja modal urusan pilihan di Provinsi Jambi memiliki nilai koefisien regresi sebesar $0,186$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,042$. Artinya, belanja modal urusan pilihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi. Jika belanja modal urusan pilihan naik 1 persen, maka akan meningkatkan jumlah pengangguran di Provinsi Jambi sebesar $0,186$ persen. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis, bahwa belanja modal urusan pilihan berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi. Hal ini menggambarkan, bahwa belanja modal urusan pilihan Provinsi Jambi digunakan oleh badan, kantor, lembaga dan dinas belum menyentuh langsung pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja.

Pengaruh belanja modal urusan wajib terhadap jumlah penduduk miskin

Belanja modal urusan wajib di Provinsi Jambi memiliki nilai koefisien regresi sebesar $0,125$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,003$. Artinya, belanja modal urusan wajib berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Jika belanja modal urusan wajib naik 1 persen, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar $0,186$ persen. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis, bahwa belanja modal urusan wajib berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi. Hal ini menggambarkan, bahwa belanja modal urusan wajib Provinsi Jambi digunakan oleh badan, kantor, lembaga dan dinas belum mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk Provinsi Jambi, sehingga jumlah penduduk miskin belum dapat diatasi, belanjanya lebih banyak dilakukan pada kegiatan atau program yang bersifat padat modal.

Pengaruh belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin

Belanja modal urusan pilihan di Provinsi Jambi memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,019 dengan nilai probabilitas sebesar 0,029. Artinya, belanja modal urusan pilihan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Jika belanja modal urusan pilihan naik 1 persen, maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 0,019 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis, bahwa belanja modal urusan pilihan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Hal ini menggambarkan, bahwa belanja modal urusan pilihan Provinsi Jambi digunakan oleh badan, kantor, lembaga dan dinas lebih mengarah pada pengurangan jumlah penduduk melalui kegiatan atau program yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk Provinsi Jambi, sehingga jumlah penduduk miskin bisa diatasi.

Pengaruh jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin

Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,012 dengan nilai probabilitas sebesar 0,038. Artinya, jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Jika jumlah pengangguran naik 1 persen, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 0,012 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis, bahwa jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Hal ini menggambarkan, jumlah pengangguran adalah salah satu penyebab meningkatnya penduduk miskin di Provinsi Jambi. Meningkatnya jumlah penduduk miskin sebagai akibat meningkatnya jumlah pengangguran, disebabkan adanya peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja dan tidak diikuti oleh kemampuan menciptakan lapangan kerja pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pengaruh belanja modal urusan wajib, belanja modal urusan pilihan dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin

Berdasarkan hasil analisis jalur melalui uji sobel. Variabel jumlah pengangguran tidak dapat memediasi belanja modal urusan wajib terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi selama tahun 2008-2020, karena variabel belanja modal urusan wajib memiliki nilai Z sobel sebesar $-0,60410601 < 1,96$ dan nilai probabilitas sebesar $0,27288658 > 0,05$, maka dapat disimpulkan secara tidak langsung belanja modal urusan wajib tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel jumlah pengangguran dapat memediasi belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi selama tahun 2008-2020, karena belanja modal urusan pilihan memiliki nilai Z sobel sebesar $2,47939717 > 1,96$ dan nilai probabilitas sebesar $0,03951710 < 0,05$, maka dapat disimpulkan secara tidak langsung belanja modal urusan pilihan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi.

Tidak berpengaruhnya belanja modal urusan wajib terhadap jumlah kemiskinan melalui jumlah pengangguran di Provinsi Jambi, disebabkan tidak semua kegiatan atau program yang dibiayai dari belanja modal urusan wajib langsung bisa menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi anggaran yang dikeluarkan lebih bersifat memberi dampak dalam jangka panjang dalam mengurangi jumlah penduduk miskin melalui pengurangan jumlah pengangguran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan belanja modal urusan wajib, belanja modal urusan pilihan, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi selama tahun 2008-2020 cenderung berfluktuasi. Rata-rata belanja modal urusan wajib meningkat 7,90 persen, belanja modal urusan pilihan rata-rata meningkat 32,16 persen, jumlah pengangguran rata-rata meningkat 4,44 persen dan jumlah penduduk miskin rata-rata meningkat 0,83 persen.

Pengaruh belanja modal urusan wajib dan belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah pengangguran sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi: a). Belanja modal urusan wajib berpengaruh negatif (koefisien regresi -0,098) dan signifikan (probabilitas 0,030) terhadap jumlah pengangguran. b). Belanja modal urusan pilihan berpengaruh positif (koefisien regresi 0,186 dan signifikan (probabilitas 0,042) terhadap jumlah pengangguran. c). Belanja modal urusan wajib berpengaruh positif (koefisien regresi 0,125) dan signifikan (probabilitas 0,003) terhadap jumlah penduduk miskin. Belanja modal urusan pilihan berpengaruh negatif (koefisien regresi -0,01) dan signifikan (probabilitas 0,029) terhadap jumlah penduduk miskin. d). Jumlah pengangguran berpengaruh positif (koefisien regresi 0,012) dan signifikan (probabilitas 0,038) terhadap jumlah penduduk miskin. e). Pengaruh langsung belanja modal urusan wajib berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (koefisien jalur 0,839). f). Pengaruh langsung belanja modal urusan pilihan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin (koefisien jalur -0,198). g). Pengaruh langsung belanja modal urusan wajib berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. (koefisien jalur -0,213). h). Pengaruh langsung belanja modal urusan pilihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran. (koefisien jalur 0,635). i). Pengaruh langsung jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. (koefisien jalur 0,039). j). Pengaruh tidak langsung belanja modal urusan wajib terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan koefisien jalur sebesar -0,001176 dan probabilitas 0,27277658 atau variabel jumlah pengangguran tidak dapat dijadikan sebagai variabel intervening. k). Pengaruh tidak langsung belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin melalui jumlah pengangguran di Provinsi Jambi berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien jalur 0,002232 dan probabilitas 0,03951710 atau variabel jumlah pengangguran dapat dijadikan sebagai variabel intervening. l). Total pengaruh belanja modal urusan wajib terhadap jumlah penduduk miskin sebesar -0,099176 dan total pengaruh belanja modal urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 0,188232.

Saran

Belanja modal urusan wajib dan belanja modal urusan pilihan yang dilakukan oleh badan, lembaga, kantor dan dinas di Provinsi Jambi perlu terus di tingkatkan dan ditujukan dalam rangka meningkatkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu menciptakan lapangan kerja selain menambah penerimaan daerah. Jumlah pengangguran perlu ditekan dengan menciptakan lapangan kerja bagi semua lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk miskin perlu terus ditekan serendah mungkin, melalui program keluarga berencana dan

melanjutkan program pengentasan kemiskinan di setiap kabupaten/kota secara lebih optimal.

Anggaran belanja daerah pada belanja modal, baik urusan wajib dan urusan pilihan perlu terus ditingkatkan pada setiap kantor, badan, lembaga dan dinas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan memprioritaskan anggaran yang mampu menciptakan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Eka, Syechalad, Nur Dan Hamzah, Abubakar. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. 4(2), 265-283
- Alam S. (2011). *Economics*. Erlangga: Jakarta.
- Anggareny, Rumahorbo, Restuty. (2014). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanudin: Makasar.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. (2011). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. BPFE: Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. (2018). *Ekonomi pembangunan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2015, 2018 dan 2020. Provinsi Jambi.
- Ferezagia, Debrina. Vita. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. 1(1). 2622 – 1764.
- Gumala, Fika., & Anis, Ali. (2019). Pengaruh korupsi, kualitas pembangunan manusia dan penanaman modal asing (FDI) terhadap kemiskinan di ASEAN. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. 1(2). 541-552
- Hair, J.F, Black, W.C, Babin, B.J., & Anderson, R. E. (2009). *Multivariate data analysis*, 7th ed, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi keuangan daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. (2010). *Akuntansi keuangan daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul., & Damayanti, Theresia. (2007). *Pengelolaan keuangan daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Harlik, Amri Amir., & Hardiani. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*. 1(2), 109-120
- Haughton, Jonathan., & Shahidur R. Khandker. (2012). *Pedoman tentang kemiskinan dan ketimpangan (handbook on poverty and inequality)*. Salemba Empat: Jakarta.
- Irawan., & Suparmoko. (2017). *Ekonomika pembangunan*. Edisi Keenam. BPFE: Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. (2013). *Mudah memahami dan menganalisis indikator ekonomi*. UPP STIEM YKPN: Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. (2019). *Ekonomika regional: teori dan aplikasi*. Rajawali Press: Jakarta.
- Mahmudi. (2018). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

- Mangkoesebroto, Guritno. (2006). *Ekonomi publik*. BPFE UGM: Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory.(2018). *Pengantar ekonomi makro*. Edisi Ketujuh. Salemba Empat: Jakarta.
- Nordiawan, Deddi., & Hertianti, Ayuningtyas. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Republik Indonesia.
- Putra, Dian. Nugraha. (2020). *Kemiskinan di Kota Bengkulu, apa penyebabnya*. *Jurnal JIEP*. 20(1), 31-37
- Rika, S. Darma, Munawaroh., & Puruwita, Dita. (2012). *Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran terhadap kemiskinan di DKI Jakarta*. *Econosains*. 10(2), 144-157
- Riski, Mhd Syamsuri., & Bandiyono, Agus. (2018). *Pengaruh belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi terhadap peningkatan ipm, jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan (studi kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)*. *Jurnal Info Artha*, 2(1). 11-28
- Setiawan, Anjar. (2010). *Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah (studi kasus pada Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang: Semarang.
- Sunyoto, Danang. (2012). *Model analisis jalur untuk riset ekonomi*. Yrama Widya: Bandung.
- Tambunan, Tulus. (2006). *Perekonomian Indonesia sejak orde lama hingga pasca krisis*. Pustaka Quantum. Jakarta.
- Teguh, Radite, Handalani. (2019). *Determinan kemiskinan daerah provinsi di Indonesia: tinjauan kebijakan publik*. *Jurnal Borneo Administrator*. 15(1), 59-80
- Tanjung, Hafiz Abdul. (2009). *Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah untuk SKPD*. Buku 1 Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.
- Triyono, Aris. (2020). *Pengantar ekonomi pembangunan*. Cetakan Pertama. Deepublish. Malang.
- Todaro, P. Michael. (2010). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Edisi Kesembilan. Erlangga: Jakarta.
- Umam, Khairul. (2018). *Analisis pengaruh investasi terhadap jumlah pengangguran di Kota Bandar Lampung dalam perperstif ekonomi islam Periode 2006-2015 (Studi Pada DPM Dan PTSP Provinsi Lampung)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wardhana, Adhitya., & Kharisma, Bayu. (2019). *Peran pengeluaran sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia*. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. 8(12),
- Wahyu, Wing, Winarno. (2009). *Analisis ekonometrika dan statistika dengan eviws*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN:Yogyakarta.

- Widarjono, Agus. (2015). *Analisis multivariat terapan dengan SPSS, AMOS, dan Smartpls*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Widarjono, Agus. (2018). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*. Edisi Keempat. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Winardi. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Gramedia: Jakarta.
- Yoga, I Made. Prasada, Mala, Tri Fatma. Yulhar., & Alfina, Tia. Rosa. (2020). Determinants of proverty rate in java island : allevation policy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 18(2),95-104